

PELARANGAN DAN PERJUANGAN: PEMAKAIAN JILBAB BAGI KALANGAN PELAJAR PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1982-1991

LENI NURAENI¹, SETIA GUMILAR²

¹leninuraeni3101@gmail.com, ²setiagumilar@gmail.com

Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Pada abad ke 20 sebutan kerudung lebih populer dibandingkan dengan jilbab, sebutan jilbab di Indonesia baru terkenal tahun 80an. Kerudung lebih identik dengan penutup kepala, sedangkan jilbab identik dengan baju kurung yang longgar menutupi dada. Pada tahun 80an jilbab mulai banyak dipakai oleh masyarakat, salah satunya para pelajar putri. Pemakaian jilbab dikalangan para pelajar putri disebabkan oleh adanya gerakan-gerakan dakwah Mesjid Salman ITB dalam bentuk pelatihan LMD, SII, dan sebagainya. Maraknya pemakaian jilbab pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1982-1991 menimbulkan tantangan dan perjuangan bagi para pelajar putri, karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Untuk menjawab masalah tersebut, arah penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan Pelarangan dan Perjuangan Pemakaian Jilbab Pelajar Putri pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991. Pengumpulan data mengenai tema tersebut dilakukan melalui penelusuran literature. Temuan-temuannya yaitu berupa polemik yang terjadi antara para pelajar putri dan sekolah-sekolah negeri. Polemik pemakaian jilbab tersebut tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru. Pada masa itu pemerintah banyak mencurigai umat Islam. Namun, diakhir pemerintahan Orde Baru, pemerintah mendekati dan mengakomodasi Islam, termasuk pemakaian jilbab di kalangan pelajar putri.

Kata kunci: Pelarangan, Jilbab, Orde Baru, Muslim, Pelajar

ABSTRACT

In the 20th century the term kerudung (headscarf) was more popular than the jilbab (hijab), the term jilbab in Indonesia was popular in the 80s. Kerudung is more identical to the head covering, while the jilbab is identical to any long and loose-fit coat or outer garment covering the chest. In the 80s, the jilbab began to be widely used by the muslim women, one of which was students. The use of jilbab among students is caused by the da'wah movements of the ITB Salman Mosque in the form of training for LMD, SII, and so on. The widespread use of jilbab during the New Order government in 1982-1991 created challenges and struggles for female students, because it was against government policy. In analysing the problem, this article uses a descriptive analytical approach which aims to explain the Prohibition and Struggle of the Use of Jilbab for Female Students during the New Order Period 1982-1991. The data collection was carried out through a literature search. There are polemics among female students, for government forbade the use of Jilbab in schools. The polemic arose because there was not good relation between Ummat Muslim and the New Order government. However, at the end of the New Order government, the government approached and accommodated Islam, including the use of jilbab in schools.

Keywords: Prohibition, Jilbab, New Order, Muslim, Students



PENDAHULUAN

Jilbab pada umumnya dijadikan sebagai pakaian wajib bagi wanita Muslim untuk menutupi auratnya. Dalam pemakaiannya, terdapat dua potongan ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum seperti Surah An-Nur (24) 31 yang artinya: "Maka panjangkanlah (julurkanlah) kerudung mereka hingga menutupi dadanya". Dan surah Al-Ahzab (33) 59 yang artinya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, para wanita muslim, hendaklah mereka menutupi tubuhnya dengan jilbab" (Shahab, 1988).

Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah tidak jarang lagi dijumpai wanita Muslim mengenakan jilbab. Bahkan di masa yang modern ini dengan modelnya yang beragam, jilbab sudah menjadi sebuah tren. Namun, perlu diketahui berdasarkan historisnya, pemakaian jilbab merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dulu sebelum adanya Islam. Pemakaian jilbab di kalangan wanita Muslim Indonesia merupakan hasil dari budaya yang dibawa oleh orang-orang Arab seiring dengan Islamisasi selama berabad-abad. (Suryahadi, 2019)(Suryahadi, 2019). Pada awal masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan para pedagang dari Gujarat sudah mengenakan penutup kepala atau jilbab. Setelah agama Islam banyak dianut oleh masyarakat pribumi, pemakaian jilbab semakin populer hanya saja penyebutannya berbeda-beda. Di Indonesia jilbab sering disebut juga dengan kerudung, namun jilbab dan kerudung memiliki makna yang berbeda. Jilbab merupakan kain longgar tebal yang dilipat sedemikian rupa sehingga dapat ditarik di sekitar wajah dan disematkan dengan aman di bawah dagu, sehingga rambut, telinga, tertutup

sepenuhnya. Kainnya sendiri menjulur sampai menutupi dada dengan gaya yang relatif sederhana. Biasanya jilbab dikenakan dengan blus longgar, baju lengan panjang, dan kaus kaki (Tempo, 1991). Sebaliknya, kerudung merupakan penutup kepala yang transparan disampirkan di atas kepala sehingga masih memperlihatkan keindahan rambut yang ditata sedemikian rupa (Samho, 2019)..

Pada abad ke 20 sebutan kerudung lebih populer dibandingkan dengan jilbab, sebutan jilbab di Indonesia baru terkenal tahun 80an. Selaras dengan Suzzane Branner (SB), ia juga mengemukakan bahwa jilbab mulai populer dan banyak dipakai oleh perempuan Muslim Indonesia pada tahun 80an salah satunya disebabkan oleh banyaknya gerakan Islam saat itu yang dipengaruhi oleh Revolusi Iran pada tahun 1979, yang mana perempuan di Iran diwajibkan mengenakan jilbab (Sunesti, 2016). Mengenai siapa Muslimah pertama yang mengenakan kerudung atau jilbab di Indonesia belum diketahui, tapi yang pasti jilbab telah dipakai salah satunya oleh tokoh perempuan terkenal seperti Rahma El-Yunusiyah, Rasuna Said, Siti Walidah, Opu Daeng Risaju dan sebagainya. Pada masa itu wanita muslim yang memakai jilbab hanya sebagian, kebanyakan wanita memakai kerudung yang dipadupadankan dengan kebaya. Untuk memakai kebaya biasanya perempuan dulu memakai selendang transparan sebagai penutup rambutnya yang ditusuk dengan konde. Selain kerudung, perempuan dulu juga mengenakan jilbab tapi sesuai dengan baju yang dipakai, jika seorang perempuan mengenakan pakaian yang berpotongan agak pendek maka ia bisa melepasnya, begitupun sebaliknya.

Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991

Seiring dengan berkembangnya zaman, jilbab selalu menjadi polemik mengikuti umat Islam setiap masanya. Seperti pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 80an, ketika jilbab mulai banyak dipakai oleh para perempuan dari berbagai kalangan termasuk para pelajar. Maraknya pemakaian jilbab pada masa ini merupakan hasil dari kaderisasi dakwah yang dilakukan di berbagai tempat salah satunya di Mesjid Salman ITB. Akibat dari kaderisasi dakwah tersebut timbul sebuah tantangan, khususnya bagi para pelajar yang mengenakan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Yaitu dengan munculnya kebijakan mengenai peraturan seragam sekolah yang secara tidak langsung melarang para pelajar putri memakai jilbab di sekolah-sekolah negeri (lembaga pendidikan) melalui Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D.1982 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 1982 dan dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) yang ketika itu dijabat oleh Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. SK. (Alwi Alatas & Fifrida Desliyanti, 2001).

Polemik pemakaian jilbab yang terjadi antara pelajar di sekolah-sekolah negeri disebabkan karena pada masa awal pemerintahan Orde Baru hubungan umat Islam dengan pemerintah bisa dikatakan kurang baik, berbagai ketegangan timbul pada masa itu. Ketegangan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru adalah refleksi dari kekhawatiran pemerintah terhadap Islam yang akan mengancam pemerintahannya. Apalagi gagasan Pancasila sebagai asas tunggal bagi perpolitikan di Indonesia yang tak jarang ditentang oleh Organisasi-organisasi Massa Islam seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sebagainya,

pada masa ini pemerintah semakin berhati-hati terhadap umat Islam. Itulah sebabnya mengapa pemerintah membatasi pergerakan umat Islam khususnya di bidang politik.

Salah satu akibat dari kekhawatiran pemerintah tersebut, menyebabkan munculnya kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam, salah satunya kebijakan SK 025 yang sangat menekan dan mengancam para pelajar, tidak sedikit dari mereka yang diancam oleh pihak sekolah dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah swasta jika tetap bersikukuh memakai jilbab. Berbagai perjuangan untuk bisa mengenakan jilbab ke sekolah pun sebenarnya telah mereka lakukan bahkan sampai pada proses pengadilan, namun polemik jilbab tersebut pada akhirnya bisa diselesaikan oleh akomodasi pemerintahan Orde Baru sendiri terhadap Islam, dan upaya penyelesaian dari beberapa Organisasi-organisasi Massa dan MUI.

Hal ini sudah sangat jelas bahwa pelarangan mengenakan jilbab merupakan bagian dari politik pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru yang berkuasa berusaha meminggirkan simbol-simbol Islam selama priode awal kepemimpinannya. Sikap pemerintah mengeluarkan aturan tersebut menyebabkan banyak persoalan yang berlarut-larut, andaikan saja pemerintah lebih bersikap toleran dan melihat pemakaian jilbab bukan dari sudut politik tapi merupakan hak seseorang untuk menjalankan kewajibannya dalam beragama mungkin polemik tersebut tidak akan terjadi (Kiblat, 1989).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Islam dan Pemerintahan Orde Baru, awal mula maraknya pemakaian jilbab



di sekolah-sekolah, polemik dan perjuangan para pelajar akibat memakai jilbab di sekolah-sekolah pada Masa Orde Baru khususnya tahun 1982-1991. Untuk itu, Penelitian ini sangat penting untuk dibahas karena memberikan informasi lebih luas kepada wanita Muslim di Indonesia khususnya para pelajar bahwa untuk memakai jilbab ke sekolah-sekolah dulu memerlukan perjuangan yang besar, tidak seperti saat ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Peneliti mendeskripsikan mengenai Pelarangan dan Perjuangan Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991 dan upaya-upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan politik. Pendekatan sosial ditandai dengan maraknya para pelajar Muslim yang mengenakan jilbab ke sekolah pada masa pemerintahan Orde Baru, meskipun pemerintah pada masa itu mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan jilbab di lembaga pendidikan, tetapi mereka menentang kebijakan tersebut dengan tetap memakai jilbab ke sekolah. Sedangkan pendekatan politik berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan umat Islam salah satunya berdampak pada larangan penggunaan jilbab bagi para pelajar.

Pada umumnya metode atau langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah ini adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Daliman, 2015). Dalam heuristik penulis menemukan dan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan tema yang dibahas dari berbagai perpustakaan seperti

perpustakaan Batu Api Jatinangor. Untuk sumber primer, penulis menemukan beberapa surat kabar seperti Kiblat tanggal 6-19 November 1989, Tempo 19 Januari, 8 September, 9 November 1991 dan buku Revolusi Jilbab Kasus Pelanggaran Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991. Sedangkan untuk sumber sekunder penulis menemukan beberapa buku dan jurnal yang sesuai dengan tema.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber yang telah ada, baik sumber primer seperti Kiblat tanggal 6-19 November 1989, Tempo 19 Januari, 8 September, 9 November 1991, buku Revolusi Jilbab Kasus Pelanggaran Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991 dan sumber sekunder yang ditemukan dari beberapa buku dan jurnal masih sangat layak untuk dikaji serta masih sangat jelas untuk dibaca.

Setelah melakukan kritik sumber, disini penulis menginterpretasikan tema yang akan dibahas disertai dengan fakta sejarah mengenai Pelarangan dan Perjuangan Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991 berdasarkan sumber-sumber yang telah didapat dan dibaca.

Tahap terakhir yaitu historiografi dimana penulis menyusun atau menuangkan penulisan berdasarkan sumber atau data yang telah mengalami proses heuristik, kritik, dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru lahir atas dasar konflik berdarah yang disebabkan oleh kalangan kiri pada 30 September 1965. Berbagai polemik yang terjadi pada tahun 1965-1966 menandai suatu transisi berakhirnya kepemimpinan Soekarno dan naiknya Soeharto dalam

Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991

kekuasaan Indonesia. Naiknya pemerintahan Soeharto ditandai dengan berbagai aksi protes organisasi pelajar atau pemuda untuk menentang PKI dan mendukung terhadap pembaharuan politik diantaranya pergantian Presiden. Aksi protes tersebut mencapai puncaknya pada 11 Maret 1966 yang membuat Pemerintah Orde Lama terdesak dan menandatangani Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Melalui Supersemar inilah pemerintahan Orde Baru lahir dan mulai melakukan penataan keadaan bangsa Indonesia. Runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru ini menimbulkan semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah Orde Baru karena telah berhasil membubarkan PKI dan memulihkan keamanan rakyat. Tindakan Soeharto tersebut disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia, mereka berharap Orde Baru bisa menghantarkan bangsa Indonesia ke jalan demokrasi, kebebasan dan kemakmuran. Panglima yang berani membubarkan PKI itu dalam kurun waktu yang relatif sebentar telah berhasil menjadi Presiden kedua Indonesia. Untuk memulihkan keadaan dan berbagai ketegangan baik ekonomi maupun politik, Presiden Soeharto membentuk kabinet pembangunan. Sejak saat inilah selama 32 tahun pemerintah Orde Baru menancapkan layarnya dalam kekuasaan Indonesia dengan memanfaatkan ABRI dan Golkar (Golongan Karya) sebagai alat kekuasaannya (Armand, 1988).

Dengan berkuasanya pemerintahan Orde Baru, banyak masyarakat salah satunya para aktivis Islam menaruh harapan besar bahwa umat Islam dapat berperan dalam pemerintahan. Mereka berharap pemerintah yang baru ini akan

membawa Islam ke posisi yang sah dalam kehidupan publik. Namun, harapan tersebut ternyata berlawanan dengan keadaan pada masa itu, ketika umat Islam mulai mengalami suatu kebangkitan, pemerintah justru menunjukkan sikap yang kurang mesra terhadap politik-politik Islam. Hal ini tampak pada gagalnya rehabilitasi Partai Masyumi agar dapat diperkenankan masuk ke arena politik. Pemerintah keberatan jika partai Masyumi kembali berperan dalam politik karena mereka curiga terhadap politik Islam yang akan menentang ideologi Pancasila. Bahkan pada saat pemerintahan Orde Baru mengesahkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi sebagai reinkarnasi Masyumi, bekas anggota dan pemimpin Masyumi dilarang menduduki kepengurusan Parmusi.

Dalam pemilu, partai-partai Islam selalu mengalami kekalahan dan tekanan dari pemerintah Orde Baru. Pemerintah terus berusaha memenangkan Golkar dengan mengharuskan seluruh aparat negara dan birokrasi menunjukkan monoloyalitasnya pada Golkar. Kemenangan Golkar pada tahun 1971 yang luar biasa dalam pemilu mempercepat penyederhanaan partai untuk mengontrol dan menjinakan politik Islam. Penyederhanaan partai ini mendesak sembilan partai menjadi tiga partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar).

Keadaan politik Islam pada masa pemerintahan Orde Baru tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintah Orde Baru selalu menganggap umat Islam sebagai ancaman bagi pemerintah karena mereka memiliki kekuatan yang besar dan memiliki wacana untuk



menerapkan syariat Islam di Indonesia, sedangkan ini berbenturan dengan keinginan pemerintah yang menerapkan asas tunggal Pancasila. Jadi tidak heran jika Soeharto membatasi pergerakan umat Islam khususnya dalam bidang politik. Pemerintah berusaha menyingkirkan simbol-simbol Islam dalam kegiatan politik, menjauhkan para politisi Islam dari politik, dan mengeliminasi berbagai partai politik Islam. Penyingkiran Islam dalam politik mencapai puncaknya yaitu pada saat semua partai politik Islam digabungkan ke dalam PPP pada tahun 1973 dan harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985. Penyingkiran ini dijalankan dengan menjinakkan kekuatan politik Islam melalui pelemahan partai-partai Islam. Sebenarnya, rencana untuk melemahkan partai-partai politik Islam telah berlangsung sejak tahun 1969. Setelah dikeluarkannya rancangan Undang-undang pemilu di DPR tahun 1969, Soeharto memerintahkan untuk melakukan kampanye. Sementara itu, jabatan kekuasaan pemilu berada dalam tujuan Pancasila sebagai satu-satunya asas negara, partai politik harus berdasarkan pada pembangunan, jumlah partai politik dikurangi, dan partai-partai politik dipisahkan dari organisasi massa. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan sangat diutamakan pada masa Orde Baru.

Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal merupakan upaya untuk memperkuat dan mencapai politiknya. Pada awalnya penerapan Pancasila sebagai asas tunggal negara menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya umat Islam. Tidak sedikit para aktivis Islam menolak penerapan Pancasila sebagai asas

tunggal, penolakan tersebut dilatarbelakangi karena umat Islam khawatir Pancasila akan mengarah pada terbentuknya negara sekuler dan memarginalisasikan peran agama.

Reaksi lainnya juga datang dari para mantan anggota Masyumi dan politikus Islam, mereka menyatakan bahwa Presiden menggunakan asas tunggal Pancasila sebagai alat untuk menyerang lawan politiknya dengan menyempitkan aspirasi rakyat sebagai usaha pemerintah untuk menerapkan suatu sistem partai tunggal. Dengan diterapkannya Pancasila sebagai asas tunggal menyebabkan partai akan sulit menjelaskan program yang mereka inginkan, karena kriteria atau nilai yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program akan sama. Hal tersebut akan menyebabkan kurangnya dukungan rakyat kepada mereka. Dengan diterapkannya asas tunggal Pancasila, setiap perhimpunan atau perserikatan yang tidak berdasarkan dengan Pancasila dianggap bertentangan dengan negara. Kondisi tersebut kembali menimbulkan ketidakpuasan umat Islam, tapi berbagai macam reaksi yang muncul baik dari para politikus Islam atau Organisasi Massa lainnya tidak mengubah pemerintah Orde Baru untuk tidak menetapkan asas tunggal Pancasila. Pemerintah akan menindak tegas siapapun yang tidak menerima kebijakan pemerintah tersebut. Berlakunya kebijakan asas tunggal Pancasila juga telah mengubah salah satu partai PPP yang awalnya berasaskan Islam diganti menjadi asas tunggal Pancasila. Hal ini menandai bahwa perjalanan politik Islam di Indonesia secara tidak langsung telah mengalami kekalahan. Dengan keadaan demikian, para aktivis dan pemikir Islam mulai bersikap akomodatif dan menerima kebijakan pemerintah Orde

Baru. Sehingga dengan sikap akomodatif para aktivis Islam tersebut, kekhawatiran pemerintah terhadap Islam mulai hilang.

Sikap akomodatif umat Islam terhadap pemerintahan Orde Baru menyebabkan mulai terjalannya hubungan antara Islam dan pemerintah, hal ini dimungkinkan karena pemerintah merasa Islam sudah tidak lagi menjadi ancaman. Bahkan Soeharto mendekati Islam dan merangkul kalangan Islam konservatif untuk lebih memperkuat kekuasaannya karena Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pemerintah sangat memerlukan dukungan mereka. Hubungan ini terus berkembang hingga yang awalnya pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam seperti tidak disahkannya Undang-undang perkawinan, Undang-undang peradilan agama, larangan para pelajar Muslim memakai jilbab ke sekolah-sekolah negeri dan sebagainya pada masa ini dihapuskan. Keharmonisan yang terjalin sangat berdampak positif bagi umat Islam. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) juga bisa dikatakan sebagai awal kebangkitan kembali politik Islam (Hefner, 2001).

Jilbab dan Awal Pemakaiannya di Sekolah-sekolah Negeri pada Masa Orde Baru

Menurut bahasa jilbab berasal dari bahasa Arab yaitu *Jalaabiib* yang artinya pakaian luas atau lapang. Sedangkan menurut istilah jilbab adalah baju kurung atau penutup kepala yang lapang dan dapat menutupi aurat perempuan kecuali wajah (Mullhandy Ibn.Haj, Kusumayadi & Amir taufik, 1989). Di Barat kata jilbab lebih populer dengan sebutan *veil*, kata *veil* mengandung arti penutup, menutupi,

menyamarkan, atau menyembunyikan. Istilah ini biasanya digunakan untuk ungkapan a) kain memanjang yang biasa dipakai wanita untuk menutupi bahu, kepala, dan muka; b) sebuah rajutan panjang yang menempel pada penutup kepala wanita atau topi yang dipakai untuk melindungi kepala serta wajah; c) bagian penutup kepala biarawati; d) kain tipis untuk menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya. Mengenai siapa yang mengawali penggunaan jilbab, tidak diketahui. Yang jelas berdasarkan historis jilbab sudah ada dan dikenakan sebelum Islam hanya saja penyebutannya berbeda-beda. Seperti di Mesopotamia, Assyiria, dan Babilonia jilbab pada umumnya telah diakui keberadaannya. Jilbab tidak hanya dipakai oleh kaum wanita saja tapi juga dipakai oleh kaum laki-laki. Lichtenstader mengemukakan bahwa dari masa Arab sebelum Islam jilbab telah digunakan dikalangan laki-laki, untuk melindungi diri mereka dari bahaya orang-orang yang iri. Selain itu, jilbab juga dipakai oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. El Guindi menyatakan bahwa pemakaian jilbab pada masa itu dimaknai sebagai suatu pola tradisi budaya, pola tersebut memiliki makna dan fungsinya tersendiri yaitu kontemporer seperti di Sumeria, eksklusif seperti di Mesopotamia, egalitarian seperti di Mesir, hierarkis seperti dalam kultur Hellenis, dan seklusionaris seperti dalam kultur Byzantium (Guindi, 1999).

Pengaruh dari pemakaian jilbab sebelum datangnya Islam tersebut mempengaruhi kultur Islam. Ketika bagian-bagian pesisir kota Arab menjadi wilayah perdagangan yang disebabkan perubahan rute perdagangan guna menghindari akibat peperangan Romawi-Byzantium, budaya Hellenisme mempengaruhi tradisi kultur Arab dan



jilbab mulai tersebar. Jilbab yang dikatakan sebagai pakaian pilihan dijadikan sebagai pakaian wajib untuk menutupi aurat wanita, hukum tersebut diperkuat oleh Al-Quran Surah An-Nur (24) 31 dan surah Al-Ahzab (33) 59 (Mulhandy Ibn. Haj., 1989).

Setelah jilbab telah tersebar termasuk ke Indonesia, pada mulanya jilbab dianggap sebagai simbol yang terpinggirkan. Disamping jilbab hanya dipakai pada momen-momen tertentu saja seperti aktifitas keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, melayat, pengajian dan lain-lain. Jilbab juga dijadikan sebagai suatu keyakinan agama seseorang, hal itu selaras dengan keadaan pada masa Orde Baru dimana para pelajar tetap mengenakan jilbab ke sekolah walaupun harus melewati berbagai tantangan tapi karena memakainya merupakan suatu bentuk keyakinan beragama, mereka mampu bertahan.

Awal maraknya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, dan bukan hanya dijadikan sebagai identitas yang membedakan antara Muslim dan non Muslim saja, tapi juga sebagai bentuk keyakinan beragama. Pemakaian jilbab di kalangan para pelajar putri merupakan hasil dari gerakan-gerakan dakwah keagamaan yang diadakan oleh berbagai lembaga seperti kampus. Gerakan yang memiliki dampak besar terhadap pemakaian jilbab para pelajar putri di sekolah-sekolah berasal dari Mesjid Salman ITB khususnya LDM (Latihan Mujahidin Dakwah) yang didirikan oleh tokoh penggerak Islam yaitu Muhammad Imaddudin. Ia membangun gerakan dakwah tersebut melalui kegiatan di berbagai mesjid-mesjid yang ada di kampus. Sebenarnya dalam gerakan dakwah tersebut tidak ada pemaksaan untuk memakai jilbab, hanya saja motivasi untuk memakai

jilbab ini disisipkan dalam berbagai materi seperti menunjukkan dalil-dalil serta membaca dan mendiskusikannya. Selain gerakan dakwah LDM yang dilakukan di Mesjid Salman ITB, ada juga SII (Studi Islam Inisiatif). Munculnya gerakan dakwah tersebut menarik perhatian para pelajar, misalnya salah satu siswi yaitu Triwulandari atau yang sering disebut juga dengan titik, pada saat liburan sekolah ia mengikuti SII. Sepulangnya dari gerakan dakwah tersebut terjadi perubahan drastis pada pola kesehariannya seperti memakai jilbab ke sekolah, lebih sering membaca Al-Qur'an dan lain-lain.

Gerakan dakwah SII yang banyak mempengaruhi maraknya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah tidak hanya diselenggarakan di Mesjid Salman ITB Bandung, tapi juga diselenggarakan di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat libur sekolah selama kurang lebih enam hari, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu membaca Al-Qur'an setelah melaksanakan salat magrib, menerima materi-materi keagamaan dan mendiskusikannya, shalat tahajud, berdzikir, dan membaca Al-Qur'an kembali setelah solat subuh. Mengenai pengaruh terhadap pemakaian jilbab sebenarnya kembali pada kesadaran masing-masing individu, tidak ada yang memaksa dan terpaksa.

Selain pengaruh dari LDM dan SII, PII (Pelajar Islam Indonesia) juga berperan besar dalam maraknya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri. Gerakan dakwah yang dilakukan oleh PII ini tidak lepas dari cabang LDM yang direalisasikan dibawah kepemimpinan Mohammad Natsir melalui DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia). DDII melakukan pelatihan kepada para instruktur lulusan berbagai universitas. Dengan demikian, tampak

Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991

bahwa terdapat hubungan antara LMD dan PII dalam maraknya pemakaian jilbab di kalangan pelajar, meskipun tidak secara khusus gerakan dakwah mengenai pemakaian jilbab.

Selanjutnya, dengan beredar buku-buku Islam juga berpengaruh bagi maraknya pemakaian jilbab dikalangan pelajar. Pada tahun 1970an, DDII bekerja sama dengan IIFSO untuk menerbitkan dan menerjemahkan buku-buku tentang Islam. Buku tersebut kemudian dibagikan secara gratis kepada berbagai lembaga pendidikan. Pada umumnya buku yang diterjemahkan merupakan karya tokoh pergerakan Islam seperti Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, dan lain-lain. Meskipun tidak diketahui dengan pasti pengaruh dari buku-buku tersebut terhadap maraknya penggunaan jilbab, tetapi buku ini menjadi bahan bacaan kader-kader PII (Alwi Alatas, 2001).

Pelarangan dan Perjuangan Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991

Maraknya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah yang disebabkan oleh adanya gerakan dakwah tersebut dianggap sebagai wujud fisik gerakan politik Islam yang bertentangan dengan pemerintah Orde Baru. Sehingga tidak heran jika kemudian terjadi perselisihan antara pemerintah dan para pelajar yang berjilbab. Pemerintah yang seringkali menganggap Islam sebagai ancaman, berusaha keras melakukan cara untuk membatasi dan menghalangi pergerakan umat Islam salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan baru pemakaian seragam sekolah secara nasional. Melalui Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D.1982 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 1982 dan dikeluarkan oleh Direktur Jendral

Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) yang ketika itu dijabat oleh Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. SK. Dengan dikeluarkannya peraturan ini sontak menimbulkan tantangan dan perjuangan bagi para pelajar pada masa itu, meskipun SK 052 tidak menyatakan secara langsung melarang pemakaian jilbab tapi kebijakan tersebut telah menunjukkan larangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri (Alwi Alatas, 2001).

Munculnya SK 052 semakin mencuat kepermukaan pada masa itu. Sejumlah sekolah-sekolah negeri melakukan tindakan tegas terhadap para pelajar putri yang mengenakan jilbab seperti tidak diperbolehkan memasuki halaman sekolah, dipulangkan kerumah masing-masing (diskorsing), diberikan teguran dengan mengirimkan surat kepada orang tuanya, penekanan guru-guru oleh pihak sekolah untuk tidak menerima pelajar yang berjilbab belajar dikelas atau mereka diberikan sanksi dengan tegas dikeluarkan dan dipindahkan ke sekolah suwasta.

Contoh beberapa kasus pelarangan jilbab diantaranya seperti di SMAN 3 Bandung, salah satu sekolah yang paling tegas menentang dan menindak pemakaian jilbab di sekolah. Para pelajar yang mendaftar ke sekolah tersebut diwajibkan menandatangani surat perjanjian yang berisi aturan atau tata tertib yang dikeluarkan oleh pihak sekolah seperti tidak diperbolehkan memakai penutup kepala baik peci maupun jilbab. Akibat dari kebijakan ini tentu banyak para pelajar yang menjadi korban skorsing. Selain itu pada tahun 1982, masih di sekolah yang sama terjadi polemik atas beberapa pelajar yang mengenakan jilbab pada mata pelajaran olahraga, dimana gurunya mengharuskan para pelajar



mengenakan celana pendek dan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian tertutup termasuk mengenakan jilbab. Jika para pelajar tersebut tetap memaksa maka mereka diancam akan mendapatkan nilai rendah dan diberikan teguran dengan mengirimkan surat kepada orang tua masing-masing. Meskipun para pelajar tersebut berupaya mengadukan masalah mereka kepada pihak yang berkaitan seperti Majelis Ulama Kotamadya Bandung (MUKB) tetapi masalah tersebut tidak dapat diselesaikan karena adanya peraturan SK 052 yang bersifat nasional (Tempo, 8 September 1989).

Di SMAN 68 Jakarta larangan pemakaian jilbab juga terjadi pada tahun 1983, Siti Ratu Nasiratun Nisa salah satu siswi kelas satu yang menjadi korban akibat memakai jilbab ke sekolah lalu dipaksa pulang untuk mengganti seragamnya dan orang tuanya dikirim surat. Ia diperbolehkan belajar kembali asalkan melepas jilbabnya, tapi ia tetap bersikeras memakai jilbab dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa pelajar putri seperti Novita dan teman-temannya pada tahun 1985 mengenakan pakaian dan kaos kaki panjang secara bertahap. Bisa membuat mereka dipanggil dan mendapat teguran dari kepala sekolah. Ketika mereka secara serempak memutuskan untuk memakai jilbab, pihak sekolah lebih marah lagi, mereka mendapat ancaman tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas sebelum melepas jilbabnya. Para pelajar ini menentang pihak sekolah untuk tetap mengikuti pelajaran di sekolah, namun kepala sekolah menyuruh mereka pulang lebih awal. Puncak amarah dari pihak sekolah juga terjadi ketika upacara bendera tahun 1985, kepala sekolah berkata di hadapan seluruh

peserta upacara 'Saya tidak ingin melihat siswa saya memakai jilbab dihadapan saya, segera antar mereka pulang kerumahnya masing-masing' (Alwi Alatas, 2001). Polemik yang terjadi di Jakarta ini menimbulkan protes dari para pelajar, mereka menyeru agar para pelajar yang memakai jilbab ke sekolah tidak mendapatkan diskriminasi. Mereka datang dengan membawa beberapa poster yang berbunyi 'Kembalikan kami ke kelas tanpa lepas jilbab', 'Jilbab no, rok mini yes'. Protes tersebut direspon oleh Depatemen P dan K dengan siaran pers 'Pelajar yang mengenakan jilbab ke sekolah dan mendapatkan tekanan, akan dibantu oleh pemerintah untuk pindah ke sekolah lain yang memperbolehkan memakai jilbab'. Bahkan seorang menteri yang bernama Nugroho Notosusanto mengatakan 'Kalau mereka tetap mengenakan jilbab, terserah, penting sekolah apa jilbab?' (Tempo, 19 Januari 1991).

Telah kita ketahui, dari tahun 1980 sampai 1985 telah menimbulkan banyak para pelajar terpaksa keluar dari sekolahnya masing-masing. Para pelajar tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hak mereka untuk memakai jilbab di sekolah. Namun, rupanya pemerintah Orde Baru tetap menganggap maraknya pemakaian jilbab ini sebagai masalah dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia harus berlomba-lomba melakukan sapu bersih pemakaian jilbab dikalangan para pelajar.

Pada tahun 1986 sampai 1987 polemik mengenai pemakaian jilbab tidak terlalu mencuat. Berbeda dengan tahun 1988 dan 1989, dimana polemik ini kembali terjadi dan lebih banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pers. Pada masa ini juga para pelajar yang memakai jilbab lebih

Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991

berani memperjuangkannya ke pengadilan. Misalnya di SMAN 1 Bogor ketika empat pelajar yang memakai jilbab mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pihak sekolah. Mereka ditekan dengan dipanggil oleh kepala sekolah, tidak diberikan nilai oleh guru, diabsen dan dianggap tidak hadir. Hal tersebut tentu menimbulkan keresahan antara para pelajar dan orang tua. Akhirnya mereka bermusyawarah dan berupaya untuk melaporkan pihak sekolah ke pengadilan. Mereka melaporkan permasalahan tersebut kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dengan dipimpin oleh Nursyahbani Katjasungkana, LBH mengajukan gugatan kepada Pemerintah, Depdikbud, Kanwil, Depdikbud Jawa Barat, Kandep Dikbud Kodya Bogor, dan Kepala SMAN 1 Bogor. Upaya mereka memperjuangkan pemakaian jilbab ke sekolah tidak sia-sia dan mendapatkan kemenangan di meja hijau.

Sama halnya dengan polemik yang terjadi di SMAN 1 Bogor, di SMAN 68 Jakarta juga terjadi polemik pemakaian jilbab yang berlanjut ke pengadilan, yang mana pada tahun 1989 sepuluh pelajar diusir dan dipulangkan kerumah masing-masing karena memakai jilbab. Namun, mereka tetap bersikukuh memakainya dan melalui LBH Jakarta mereka menggugat pihak sekolah agar keputusan sekolah yang mengeluarkan siswinya berjilbab dicabut. Namun, hasil dari gugatan ini tidak sama dengan SMAN 1 Bogor, gugatan mereka sampai tingkat pengadilan tertinggi ditolak (Tempo, 19 Januari 1991).

Selanjutnya, pada akhir tahun 1990an polemik-polemik yang terjadi mengenai pelarangan jilbab di sekolah-sekolah sudah mulai menunjukkan kemenangan bagi para pelajar yang memakai jilbab. Pada masa ini respon-

respon dan upaya penyelesaian dari lembaga Islam mulai bermunculan misalnya dari DDII, Muhammadiyah, MUI dan berdirinya ICMI sebagai bukti bahwa pemerintah lebih bersifat akomodatif terhadap Islam. DDII memainkan peranan penting dalam upaya penyelesaian polemik yang terjadi, upaya yang dilakukan DDII ini terbukti dengan menghubungi berbagai pihak yang terkait seperti MUI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Agama. DDII menyarankan agar pihak-pihak yang terkait tersebut bisa bekerja sama untuk menyelesaikan dan mengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi (Alwi Alatas, 2001).

Muhammadiyah juga berupaya merespon polemik yang terjadi di sekolah-sekolah dengan cara menerima para pelajar yang dikeluarkan dan dipindahkan oleh sekolah. Salah satu sekolah yang berperan yaitu SMA 1 Muhammadiyah Jakarta, tidak hanya menerima para pelajar yang dikeluarkan dari sekolah, tapi pihak sekolah juga memiliki wacana untuk menerapkan pemakaian jilbab di sekolah.

Selain itu, MUI yang sangat berperan besar dalam penyelesaian polemik ini mulai mengadakan pertemuan dan perbincangan secara intensif dengan Depdikbud, di bawah menteri Fuad Hasan dan Dirjen Dikdasmennya, Depdikbud mulai mempertimbangkan kembali mengenai peraturan seragam yang ada. Dari perbincangan tersebut MUI dan Depdikbud sepakat untuk menyempurnakan peraturan seragam sekolah yang telah ada. Akhirnya pada 16 Februari 1991 dikeluarkanlah SK No. 100/C/Kep/D/1991, dalam SK ini tidak disebutkan secara khusus kata jilbab, tetapi istilah yang digunakan yaitu



'seragam khas'. Peraturan tersebut berisi 'Para pelajar baik SMP maupun SMA diperbolehkan memakai seragam khas. Yang mana bentuk seragam khas yang dimaksud adalah rok panjang sampai mata kaki, baju lengan panjang dan jilbab berwarna putih. Keluar dan ditandatangani SK baru tersebut menjadi kabar gembira bagi umat Islam khususnya para pelajar dan dijadikan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Jilbab. Sejak tahun 1991, ketika pemerintah juga mulai bersikap akomodatif terhadap umat Islam usai sudah diskriminasi-diskriminasi dari pihak sekolah yang dialami oleh para pelajar, mereka bisa bernafas lega dan tidak perlu khawatir dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah lain (Tempo, 19 Januari 1991).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru pada awal kepemimpinannya menganggap Islam sebagai ancaman, sehingga pemerintah berusaha membatasi pergerakan umat Islam dan menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan umat Islam. Seperti dikeluarkannya kebijakan yang secara tidak langsung melarang penggunaan jilbab di lembaga pendidikan melalui SK 052/C/Kep/D.1982. Keluarnya SK tersebut tentu menjadi polemik bagi para pelajar yang memakai jilbab ke sekolah, tidak sedikit para pelajar yang mendapatkan berbagai tekanan dan ancaman. Dengan adanya berbagai tekanan dan ancaman tersebut, mereka terus berjuang melakukan berbagai upaya agar kebijakan larangan penggunaan jilbab ke sekolah dihapuskan. Hingga pada tahun 1991an dengan adanya akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap Islam dan

munculnya respon-respon dari lembaga atau Organisasi Massa Islam, akhir dari perjuangan tersebut mulai muncul titik terang, diawali dengan disempurnakannya kebijakan seragam sekolah hingga keluarnya SK No. 100/C/Kep/D/1991 yang memperbolehkan pemakaian seragam khas (jilbab) di sekolah-sekolah negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Alatas, Fifrida Desliyanti. 2001. *Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991*. Jakarta Timur : Al-'Tishom Cahaya Umat, 2001.
- Armand, Deddy. 1988. *SEJARAH ORDE BARU*. Jakarta : PUSTAKA KARTINI, 1988.
- Bartolomeus Samho, dkk. 2019. *Agama dan Kesadaran Kontemporer*. Yogyakarta : PT Kanisius, 2019.
- Daliman, A. 2015. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ombak, 2015.
- Guindi, Fedwa El. 1999. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Oxford : Berg, 1999.
- Hefner, Robert W. 2001. *Civil Islam*. Yogyakarta : Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 2001.
- Kiblat. 6-19 November 1989. *Suara Merdeka Yang Berjilbab*.
- Mulhandy Ibn. Haj., Kusumayadi, Amir Taufik. 1989. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*. Bandung : Prima Press, 1989.
- Shahab, Husein. 1988. *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Bandung : Mizan, 1988.
- Sunesti, Yuyun. 2016. *Ruang Publik dan Ekspresi Keberagaman Perempuan Berhijab di Yogyakarta*. Yogyakarta : Sosiologi Reflektif, 2016.
- Suryahadi, Tri Bagus. 2019. *Berjuang Di Tengah Pelarangan: Pemakaian*

Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991

Jilbab Pada Remaja Putri Di Semarang Tahun 1982-1991.
Semarang : Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2019.

Tempo. 8 September 1989. *Kerudung Lagi: Mana Toleransi Itu?*

Tempo. 9 November 1991. *Libasut Taqwa, Indah, dan Menutupi Aurat.*

Tempo. 19 Januari 1991. *Seragam Harus, Jilbab Boleh.*